

## **PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA)**

**Syafri Dharma<sup>1</sup>, Raden Biroumb<sup>2</sup>, Holten Sion<sup>3</sup>**  
Universitas Terbuka<sup>1</sup>, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya<sup>2</sup>,  
Universitas Palangkaraya<sup>3</sup>  
syafri76ut@gmail.com<sup>1</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan SIMDA pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara. Metode pendekatan penelitian kualitatif selalu berangkat dari fenomena-fenomena sosial yang di tangkap oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara. Teknik analisis data di lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari input, proses dan output sudah sesuai seperti yang diharapkan yaitu perencanaan yang tepat waktu dan penerapan SAP berbasis akrual, namun SIMDA tidak menjadikan perencanaan dan laporan keuangan lebih transparan. Simpulan, sesuai seperti yang diharapkan yaitu perencanaan yang tepat waktu dan penerapan SAP berbasis akrual, namun SIMDA tidak menjadikan perencanaan dan laporan keuangan lebih transparan.

**Kata Kunci:** Sistem Informasi, Tata Kelola Pemerintahan

### **ABSTRACT**

*This research aims to describe and analyze the application of SIMDA at the Sukamara Regency Public Housing and Settlement Area Service. Qualitative research approach methods always start from social phenomena captured by researchers. This research was conducted within the Sukamara Regency Public Housing and Settlement Area Service. Data analysis techniques in the field in this research were carried out using the Miles and Huberman model. The research results show that in terms of input, process, and output it is as expected, namely timely planning and accrual-based SAP implementation, but SIMDA does not make financial planning and reporting more transparent. Conclusion, as expected, namely timely planning and accrual-based SAP implementation, SIMDA does not make financial planning and reporting more transparent.*

**Keywords:** Government Governance, Information Systems.

### **PENDAHULUAN**

Sistem informasi adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan sebagai layanan umum masyarakat tentunya harus memberikan layanan informasi manajemen data yang baik dan akurat. Dengan adanya sistem informasi maka organisasi menyediakan lebih banyak informasi yang mendukung visi, misi, tujuan dan strategi organisasi sehingga pegawai bisa mengembangkan diri (Rulinawaty; et al., 2020).

Sehubungan dengan itu pemerintah berupaya mewujudkan pelayanan yang maksimal kepada rakyat. Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan

strategis dan kemajuan sistem informasi akan mendorong aparatur pemeritahan untuk meningkatkan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) (Rulinawaty; dkk, n.d.).

Tata kelola pemerintahan tentunya tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan hal-hal di atas adalah dengan menetapkan standar akuntansi pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Rulinawaty, Arifin, et al., 2020).

Terbitnya PP 71 tahun 2010 walaupun dalam penerapannya dapat dilakukan secara bertahap. Dengan penerapan akuntansi berbasis akrual diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemerintah, masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan, maupun bagi pengembangan profesi akuntansi dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Manfaat bagi pemerintah, antara lain untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar informasi yang berbasis kas (Rulinawaty, 2013).

Manfaat bagi masyarakat pengguna laporan keuangan, antara lain apabila laporan keuangan disajikan dengan basis akrual memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas serta pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas pemerintah.

Penerapan akuntansi berbasis akrual memerlukan SDM yang andal di bidang akuntansi, oleh karena itu profesi akuntansi diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam penyediaan dan pengembangan SDM akuntansi di sektor pemerintahan. Akhirnya, agar pelaksanaan akuntansi basis akrual diperlukan beberapa persyaratan antara lain : Sistem Akuntansi dan IT *Based System* termasuk sistem pengendalian intern yang andal; Komitmen Pimpinan, dan SDM yang memadai.

Penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah lebih khusus di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, pada Pasal 10 ayat 2 mewajibkan penerapan SAP berbasis akrual paling lambat dimulai tahun anggaran 2015. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara diamanatkan kepada Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) untuk melaksanakan asistensi dan audit kepada

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, meningkatkan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola. Sistem Akuntansi dan IT *Based System* menjadi salah satu syarat pelaksanaan SAP berbasis akrual. Untuk itu BPKP mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebagai sistem informasi atau aplikasi yang di pakai pemerintah daerah. Sampai dengan bulan September 2015, Program Aplikasi SIMDA telah diimplementasikan pada 425 Pemda dari 542 pemerintah daerah yang ada atau sebanyak 78,41%.

Pemerintah Kabupaten Sukamara sudah memakai aplikasi SIMDA sejak tahun 2011 hingga sekarang dan telah mengalami beberapa kali perubahan versi. SIMDA digunakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk oleh Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang merupakan salah satu dinas yang baru terbentuk akhir tahun 2016.

Dalam aplikasi SIMDA semua SKPD melakukan penginputan data program dan kegiatan yang akan dilaksanakan baik dalam tahun berjalan maupun untuk tahun yang akan datang serta pembuatan laporan keuangan, sesuai dengan tujuannya bahwa program aplikasi SIMDA ini adalah : menyediakan data base mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah, menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik serta memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah (Rulinawaty, Aripin, et al., 2020).

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah tentunya diperlukan untuk dapat menguasai bidang tugasnya dengan rasa tanggung jawab. Sejalan dengan itu bulan Desember tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Sukamara bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar bimbingan teknis (bimtek) implementasi SIMDA Perencanaan (*E-planing*).

Wakil Bupati Sukamara Bapak H. Windu Subagio dalam sambutannya yang disampaikan pada saat pelaksanaan bimtek implementasi SIMDA “Perencanaan mengatakan bahwa pengembangan SIMDA merupakan perencanaan untuk melengkapi sistem keuangan yang sudah ada”. Menurut beliau pula melengkapi sistem keuangan dilatarbelakangi berbagai permasalahan perencanaan yang timbul dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui pengembangan SIMDA perencanaan ini diharapkan terciptanya transparansi, objektivitas, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik kepada publik demi terwujudnya *good governance and clean goverment* dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Sesuai dengan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan uraian latar belakang dan pandangan tersebut, maka tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis penerapan SIMDA pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara. Manfaatnya diharapkan dapat menjadi acuan dan masukan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara dalam penggunaan SIMDA untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan penelitian kualitatif selalu berangkat dari fenomena-fenomena sosial yang di tangkap oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in depth interview*), observasi dan dokumentasi. Analisis data di lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data dalam model ini yaitu data condensation, data display dan conclusion drawing/verification.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil penelitian di atas tergambar penerapan SIMDA pada Dinas Perkim Kabupaten Sukamara. SIMDA merupakan program aplikasi komputer yang ditujukan untuk membantu dalam pengelolaan perencanaan dan pengelolaan keuangan, sehingga dengan aplikasi ini Dinas Perkim dapat melaksanakan perencanaan dan pengelolaan keuangan secara terintegrasi yang dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporan.

Proses pemanfaatan aplikasi SIMDA terdiri dari tiga, yaitu: input, proses, dan output.

### **Input**

Dalam input dibutuhkan pegawai sebagai petugas atau operator SIMDA, perangkat keras dan perangkat lunak, serta prosedur data. Dari aspek pegawai didapat bahwa tidak ada SK penugasan untuk pegawai yang menjadi petugas atau operator SIMDA, secara kualitas sudah memadai namun secara kualitas masih kurang, latar belakang pegawai tidak berpengaruh terhadap kemampuannya dalam penerapan SIMDA. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik pelaksana kebijakan berperan penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan (Rulinawaty, 2013), dalam hal ini penerapan SIMDA di Dinas Perkim. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi, walaupun tidak ada SK resmi yang diterima. Dengan adanya SK tentunya operator berhak mendapatkan honor dari tugasnya, namun dengan tidak adanya SK sudah bisa dipastikan petugas SIMDA tidak akan mendapatkan honor dari tugas yang dikerjakannya.

Dari aspek perangkat keras dan perangkat lunak sudah memadai. Dalam implementasi kebijakan perangkat keras dan perangkat lunak merupakan bagian dari sumberdaya yang berupa fasilitas. Dengan fasilitas yang memadai akan maka penerapan SIMDA pada Dinas Perkim akan berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dari prosedur data ditemukan bahwa tidak ada peraturan atau pedoman yang menjadi dasar penerapan SIMDA di Dinas Perkim Kabupaten Sukamara. Dengan tidak adanya dasar penerapan SIMDA, menjadikan kurangnya penekanan pimpinan terhadap penerapan SIMDA. Namun karena SIMDA terintegrasi, sehingga mau tidak mau, Dinas Perkim menerapkan SIMDA sebagai sistem informasi perencanaan dan keuangan dalam rangka SAP berbasis akrual. Data yang di input dalam SIMDA adalah data perencanaan dan transaksi dan laporan keuangan. Data perencanaan diinput oleh petugas SIMDA dan staf masing-masing bidang. Data transaksi dan laporan keuangan diinput oleh bendahara.

### **Proses**

Pada langkah ini data input dirubah dengan mengkombinasikan dengan informasi lain untuk menghasilkan data dalam bentuk yang lebih lengkap sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Langkah proses ini meliputi sederet operasi pengolahan dasar tertentu. Sebelum data diolah, data yang diinput harus diverifikasi, verifikasi dilakukan agar output yang dihasilkan akurat dan sesuai dengan yang diharapkan. Verifikasi dilakukan oleh Subbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dinas Perkim, setelah itu diverifikasi lagi oleh Bidang Belanja dan Bidang Anggaran BPKAD, khusus data perencanaan diverifikasi juga oleh Bidang Penyusunan Program BAPPEDA. Dengan adanya verifikasi kesalahan-kesalahan dapat diminimalisir.

Pada Dinas Perkim terdapat beberapa kegiatan, data target kinerja yang seharusnya kuantitatif tetapi diisi dengan kualitatif. Dikarenakan perencanaan teknis

pekerjaan belum dilakukan pada saat penyusunan rencana kerja (Renja), sehingga tidak bisa dipastikan hasil yang dicapai, sehingga data yang kami input berupa data kualitatif. Hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan melakukan perencanaan teknis dilakukan sebelum tahun anggaran pekerjaan fisik, agar target kinerja pekerjaan bisa menjadi terukur, dan target kinerja bisa diisi dengan data kuantitatif. Target kinerja pada SIMDA tidak ada hubungannya dengan capaian kinerja dalam LAKIP, karena target kinerja dalam LAKIP bukan diambil dari SIMDA, namun data realisasi anggaran atau realisasi keuangan yang dipakai dalam LAKIP adalah data yang diambil dari output SIMDA.

### **Out put**

Output yang dimaksud adalah dokumen-dokumen anggaran berupa RKA dan DPA dan elemen-elemen laporan keuangan pemerintah daerah yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Proses perencanaan dan pelaporan keuangan menjadi lebih mudah dan dapat mengefektifkan waktu penyusunan perencanaan serta laporan keuangan. Dalam output data tidak ada permasalahan yang krusial, karena output itu sendiri merupakan hasil akhir dari proses dan verifikasi yang dilakukan terhadap data yang diinput dalam SIMDA berupa dokumen-dokumen yang akan membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan SIMDA penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan memang menjadi tepat waktu, data yang dihasilkan akurat dan lengkap, bisa dipertanggungjawabkan. Namun akses masih terbatas kepada user atau pengguna saja. Sehingga tidak bisa dikatakan dengan SIMDA perencanaan dan laporan keuangan menjadi transparan.

Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan konsep sistem informasi yang menyatakan bahwa kemampuan sistem informasi untuk dapat mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi ke berbagai fungsi bisnis menjadi kritis/penting sehingga mendukung proses bisnis dan operasional organisasi (O'Brien dan Marakas, 2001). Dengan adanya kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi SIMDA di Dinas Perkim digunakan pemecahan masalah melalui pemanfaatan teknologi informasi. Keberadaan teknologi informasi memungkinkan organisasi berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan sebuah organisasi akan mampu mendapatkan dan mengetahui informasi kondisi internal organisasi, posisinya, serta perubahan lingkungan eksternal lainnya. Sebagai komponen dari sistem informasi, teknologi informasi memainkan peranan dalam banyak aspek dalam organisasi, mulai dari pengembangan produk baru sampai dengan mendukung penjualan dan pelayanan kepada pelanggan, serta menyediakan *market intelligence* sebagai alat bantu pengambilan Keputusan.

Penerapan SIMDA pada Dinas Perkim dapat menghasilkan informasi secara cepat, tepat dan akurat sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan bermakna oleh pihak yang berwenang. Hal ini sejalan dengan konsep sistem informasi yang mengemukakan bahwa Sistem informasi dapat mengkombinasikan informasi untuk membantu manajer menjalankan bisnis dengan lebih baik, informasi yang sama dapat membantu para manajer mengidentifikasi kecenderungan dan untuk mengevaluasi hasil dari keputusan sebelumnya. Sistem Informasi akan membantu para manajer membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat dan lebih bermakna (O'Brien dan Marakas, 2001). Tujuan pengembangan aplikasi SIMDA Keuangan (BPKP, 2008), salah satunya adalah menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat

dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, yaitu penggunaan aplikasi SIMDA dikembangkan guna memudahkan kegiatan satuan kerja dalam mengelola keuangan mereka, sehingga pada akhirnya pengelolaan keuangan satuan kerja tersebut menjadi lebih efektif, efisien dan ekonomis.

Salah satu variabel dalam model implementasi Edward III adalah struktur birokrasi. Aspek pertama dalam struktur birokrasi adalah mekanisme atau standart operation procedur (SOP), dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat SOP. Dengan tidak adanya SK tentang penggunaan aplikasi SIMDA dan SK tentang penugasan operator, menunjukkan bahwa penerapan SIMDA pada Dinas Perkim Kabupaten Sukamara tidak mempunyai dasar hukum dan SOP yang menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak, agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

## **SIMPULAN**

Dari hasil penelitian tentang penerapan SIMDA pada Dinas Perkim Kabupaten Sukamara dapat disimpulkan sebagai berikut : ditinjau dari input terdapat pegawai yang belum ada SK Penugasannya, belum ada peraturan atau pedoman yang menjadi dasar penerapan SIMDA, dan belum ada SOP penerapan SIMDA di Dinas Perkim. ditinjau dari proses, verifikasi sudah dilakukan sebagaimana yang diharapkan, pada Dinas Perkim ditemukan pengisian data target kinerja yang seharusnya kuantitatif namun data yang diinput kuantitatif, ditinjau dari Output, sudah sesuai seperti yang diharapkan yaitu perencanaan yang tepat waktu dan penerapan SAP berbasis akrual, namun SIMDA tidak menjadikan perencanaan dan laporan keuangan lebih transparan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul, W. S. (2001). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Badjuri, A., & Teguh, Y. (2003). *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang : FISIP UNDIP.
- Dunn., & William. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : PT Hanindita Graha Widya.
- Kismartini. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Lester., James, P., & Steward, J. R. J. (2000). *Public Policy – An Evolutionary Approach*. Belmont : Winswort
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rulinawaty; dkk. (n.d.). *Kompleksitas dan Dinamika Birokrasi Di Indonesia* (Alvian Rac). CV. Literakata Karya Indonesia, Karanganyar 2023.
- Rulinawaty;, Samboteng;, L., Aripin;, S., & Hasanuddin. (2020). *Crafting Agile Bureaucracy : Transforming Work Ethics of Civil Servants and Organisational Culture of Bureaucracy in Indonesia*. 12(11), 692–714.
- Rulinawaty. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan*. 104.
- Rulinawaty, Arifin, S., & Samboteng, L. (2020). Leading Agile Organization Can Indonesian Bureaucracy become agile? *International Research Association for Talent Development and Excellence*, 12(1). <http://iratde.com/index.php/jtde>

- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, S. A. (2001). *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Wibawa, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Widodo, J. (2011). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.